



dukcapil
sumatera barat

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

Jl. Rasuna Said No. 81 Padang
Telp/ Fax. 0751 - 8952930

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2019 dan Capaian.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	II-15
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	II-28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-30
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan.....	II-54
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD.....	IV-1
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai panduan, pedoman dan acuan tentang arah kebijakan pembangunan kedepan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam merumuskan visi, misi, tujuan, arah kebijakan strategi dan sasaran kinerja.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini diucapkan terima kasih, dan semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Maret 2022

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660919 198602 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan rancangan RENJA perangkat daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ Lintas perangkat daerah. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dengan memperhatikan kesepakatan pada hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja yang dimulai pada akhir tahun 2021 adalah Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang memuat urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program/ kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan :

1. Sebagai acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam menjabarkan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan arah pembangunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra OPD,

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4. **Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

- 3.1. **Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja OPD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3. **Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program/ Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

4.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB V PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

Hasil Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis OPD

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sinkronisasi terhadap sasaran strategis serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun 2022.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, secara fisik terlaksana sebesar 100 %, dan realisasi keuangan sebesar 95,67%. Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2021 yang telah dituangkan dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2021, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Tabel T-C 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021**

PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil dan Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian realisasi Target Rencana Strategis (%)			
-1	-2	-3	-4	-5	-6			-7	-8				
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.586.836.125					6.586.836.125	78,4			
X	PENUNJANG URUSAN			4.788.857.012					4.788.857.012	75,6			
X.XX	PENUNJANG URUSAN			4.788.857.012					4.788.857.012	75,6			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen	0	4.788.857.012				0	4.788.857.012	nan	75,6	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD	Tahun	1	110.778.200				1	110.778.200	100	56,74	
X.XX.01.1.01	Penyusunan Dokumen	Dokumen Renstra dan	Dokume	0	2	13.124.600	0	0	0	2	13.124.600	100	99,45

.01	Perencanaan Perangkat Daerah	Renja Dinas yang disusun	n											
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Anggaran (RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA,DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	Dokumen	0	6	22.723.600	0	0	0	6	22.723.600	100	51,74	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (Forum Perangkat Daerah/Dukcapil)	Kali	0	1	17.720.400	0	0	0	1	17.720.400	100	36,53	
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	Laporan	0	4	57.209.600	0	0	0	4	57.209.600	100	63,84	
		Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPj, Laporan Tahunan)	Laporan	0	4		0	0	0	4		100		
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan dan Aset	bulan		12	2.502.780.568				12	2.502.780.568	100	72,76	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Dukcapil yang dibayarkan 1 tahun	orang	0	50	2.376.875.118	0	0	0	50	2.376.875.118	100	78,85	
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daera/aset, Honor PBJ)	bulan	0	12	108.915.850	0	0	0	12	108.915.850	100	38,18	
X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	0	1	6.860.100	0	0	0	1	6.860.100	100	8,61	
X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Laporan	0	13	10.129.500	0	0	0	13	10.129.500	100	16,85	
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekon Aset, Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah,	laporan		2	36.783.010				2	36.783.010	100	44,52	

X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kendaraan Dinas	Unit	0	6	34.063.760	0	0	0	6	34.063.760	100	95,15
		Rumah Jabatan	Tahun		1					1		100	
		Jasa Jaminan Barang milik Daerah	Jenis		2					2		100	
X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Aset	Dokumen	0	1	1.341.750	0	0	0	1	1.341.750	50	2,95
X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Teratatanya Barang Milik Daerah	bulan	0	12	1.377.500	0	0	0	12	1.377.500	100	100
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas, dan terlaksananya bimbingan teknis	Laporan		2	4.147.066				2	4.147.066	100	7,41
X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Dinas Dukcapil yang mengikuti Bimtek	orang	0	10	4.147.066	0	0	0	10	4.147.066	47,6	7,41
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrsasi Umum Perkantoran	bulan		12					12	1.197.173.044	100	93,5
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/penerangan yang disediakan	bulan	0	11	14.275.200	0	0	0	11	14.275.200	91,7	99,98
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honor Pokja	OP	0	5	840.233.000	0	0	0	5	840.233.000	100	97,53
		Alat bantu sosialisasi	set		12					12		inf	
		Monitor Touch Screen	set		0					0		nan	
		Scanner	unit		0					0		nan	
		Tong sampah dorong fiber glass	unit		3					3		100	
		Vacuum Cleaner	unit		0					0		nan	
		Akses Point Wireless	Unit		12					12		inf	
		APAR	unit		12					12		inf	
		Bracket dan Strukture	set		0					0		0	
		Dispenser	unit		0					0		nan	
		Karpet	meter		100					100		100	
		Laptop	unit		0					0		nan	
		Mic Conference	set		0					0		nan	
		PC All in One	unit		0					0		nan	
		Peralatan dan Perlengkapan kantor	jenis		8					8		100	

		yang disediakan											
		Proyektor	set	0						0		nan	
		Sound System	set	1						1		100	
		Tangga lipat telescopic	set	0						0		nan	
		Tong sampah 3 warna	unit	2						2		100	
		TV Monitor and Stand	paket	0						0		0	
		UPS	unit	0						0		nan	
		Video Controler	set	0						0		0	
		Video Spliter	unit	0						0		0	
		Wall display (TV LED) 46 inc	unit	0						0		0	
		Mesin Penghancur kertas	unit	0						0		nan	
X.XX.01.1.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang disediakan	bulan	0	11	88.079.500	0	0	0	11	88.079.500	91,7	101,56
		Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	bulan		11					11		91,7	
		Alat tulis yang disediakan	bulan		11					11		91,7	
X.XX.01.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	bulan	0	11	33.038.250	0	0	0	11	33.038.250	91,7	100
X.XX.01.1.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	bulan	0	12	8.750.000	0	0	0	12	8.750.000	100	100
X.XX.01.1.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan	0	11	212.797.094	0	0	0	11	212.797.094	91,7	77,05
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan kebutuhan barang milik daerah	bulan		11	33.928.000				11	33.928.000	91,7	100
X.XX.01.1.07 .05	Pengadaan Mebel	meja eselon 2	unit	0	1	33.928.000	0	0	0	1	33.928.000	100	100
		Pengadaan meubeleur yang disediakan	jenis		7					7		100	
		Rak Buku Kayu	unit		0					0		0	
		Sofa	set		1					1		100	
		Kursi Hadap IV	unit		11					11		100	
		kursi eselon 2	unit		1					1		100	

		Meja dan Kursi Putar	set		1					1		100	
		Meja Makan Minum	set		1					1		100	
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	bulan		11	703.760.085				11	703.760.085	91,7	79,7
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang didistribusikan	surat	0	350	6.412.555	0	0	0	350	6.412.555	100	160,4
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet	Mbps	0	80	136.134.549	0	0	0	80	136.134.549	100	52,91
		Kebutuhan Jasa Informasi dan Dokumentasi	bulan		11					11		91,7	
		Telepon	rekening		1					1		100	
		Air	meter kubik		300					300		100	
		Rekening tagihan yang dibayarkan	bulan		11					11		91,7	
		Listrik	KWH		850					850		100	
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kesehatan Jasmani	bulan	0	11	561.212.981	0	0	0	11	561.212.981	91,7	90,26
		Jasa Kebersihan	orang		5					5		100	
		Jasa kebersihan, sopir dan pengamanan kantor	bulan		11					11		91,7	
		Jasa Pengaman	orang		6					6		100	
		Jasa Sopir	orang		4					4		100	
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	bulan		11	199.507.039				11	199.507.039	91,7	54,82
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	unit	0	1	9.766.751	0	0	0	1	9.766.751	100	30,77
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit	0	5	47.955.288	0	0	0	5	47.955.288	100	28,76

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rumah jabatan yang dipelihara	unit	0	1	45.900.000	0	0	0	1	45.900.000	100	100
		Gedung Kantor yang dipelihara	unit		1					1		100	
		Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	unit		1					1		100	
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Instalasi jaringan yang dipelihara (Listrik, Telp/Internet, Air)	jenis	0	3	95.885.000	0	0	0	3	95.885.000	100	80,19
		Peralatan/perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jenis		13					13		100	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.797.979.113					1.797.979.113		86,99
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					1.797.979.113					1.797.979.113		86,99
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	persen		0	531.279.450				0	531.279.450	nan	92,05
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	laporan		0	286.137.003				0	286.137.003	0	90,97

		Administrasi Kependudukan, Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi												
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sarana dan prasarana ruang server	unit	0	3	111.972.000	0	0	0		3	111.972.000	100	83,42
		Terkelolanya Jarkomdat	bulan		11						11		91,7	
		Tersedianya Jasa Administrasi Jaringan dan Programer	orang		1						1		100	
		Terlaskannya Rakor Pengolahan Data dan Penyajian Data	kali		1						1		100	
		Terfasilitasinya validasi data Sisten Informasi Administrasi Kependudukan	kali		1						1		100	
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi Informasi terkait adminduk	kali	0	6	44.354.000	0	0	0		6	44.354.000	100	97,55
		Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi	kali		1						1		100	
2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Rakor Penyelenggaraan Adminduk	kali	0	2	53.653.053	0	0	0		2	53.653.053	100	99,79
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang telah melakukan Pemanfaatan data	OPD	0	12	76.157.950	0	0	0		12	76.157.950	100	93,93
		Laporan hasil pemantauan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan data	dokumen		1						1		100	

2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan, Pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan		2	245.142.447					2	245.142.447	100	93,35
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan hasil pemantauan aplikasi pelayanan adminduk	dokumen	0	1	151.063.247	0	0	0		1	151.063.247	100	91,9
		Jumlah peserta rakor Go-Digital	orang		21						21		100	
		Laporan hasil pemantauan pemeliharaan database	dokumen		1						1		100	
		Tersupervisinya inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai atur	kabupaten/kota		19						19		100	
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek PIAK dan Bimtek Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan	orang	0	80	94.079.200	0	0	0		80	94.079.200	100	95,76
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	dokumen		0	97.322.821					0	97.322.821	nan	83,22
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Tersedianya Buku Profil Kependudukan Tingkat Provinsi, Tersedianya Buku Data Semester Kependudukan	Buku		2	97.322.821					2	97.322.821	100	83,22
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah buku data kependudukan persemester	Buku data (200 buku)	0	2	26.461.750	0	0	0		2	26.461.750	100	59,36

		Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/ Kota	kali		2					2		100	
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	orang	0	60	70.861.071	0	0	0	60	70.861.071	100	97,92
		Jumlah rapat pembahasasn dengan Kab/ Kota dan OPD/ Instansi teknis yang dilaksanakan	kali		3					3		100	
		Tersupervisinya Profil Kependudukan Kab/ Kota	Kab/ Kota		19					19		100	
		Jumlah Profil kependudukan tingkat provinsi yang disusun	profil (100 buku)		1					1		100	
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	persen		0	780.243.536				0	780.243.536	nan	80,77
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan Nasional, Pendataan Penduduk Non Permen dan rentan kependudukan lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi, Penataan Tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi, Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan	laporan		4	73.519.600				4	73.519.600	100	95,97

		Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk,												
2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terbitnya kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk	dokumen	0	1	48.885.100	0	0	0		1	48.885.100	100	98,86
		Jumlah Rakor Pencapaian Target Perekaman dan Kepemilikan KTP-el yang dilaksanakan	kali		2						2		100	
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Tersedianya data penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	kabupaten/kota	0	19	24.634.500	0	0	0		19	24.634.500	100	99,13
2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Terantau dan terkendalinya penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	kabupaten/kota	0	19	0	0	0	0		19	0	100	0
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk, Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	laporan		2	350.260.536					2	350.260.536	100	69,56
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya pendistribusian blangko KTP-el Kab/kota	kabupaten/kota	0	19	297.463.536	0	0	0		19	297.463.536	100	65,48
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan adminduk	bulan		11						11		91,7	
		Terlaksananya pekan pelayanan pendaftaran	kali		2						2		50	

		penduduk												
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	kali	0	1	52.797.000	0	0	0		1	52.797.000	100	107,2
		Jumlah Aparatur yang mengikuti Workshop Pendaftaran penduduk	orang		38						38		100	
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait pendaftaran Penduduk, Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	laporan		2	356.463.400					2	356.463.400	100	92,38
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Terpilihnya Dinas Kabupaten/Kota Terbaik	kabupaten/kota	0	5	157.381.850	0	0	0		5	157.381.850	100	97,84
		Jumlah Kab/Kotayang dibina dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran penduduk	kabupaten/kota		19						19		100	
		Laporan Hasil Monev Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk	dokumen		1						1		100	
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek daduk	orang	0	38	199.081.550	0	0	0		38	199.081.550	100	88,48
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pengrsipan	orang		38						38		100	
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek bina aparatur	orang		57						57		100	
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek front office	orang		57						57		100	
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua	persen		0	389.133.306					0	389.133.306	nan	95,65

		individu yang perceraianya dilaporkan												
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pencatatan Sipil, Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting, Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Laporan		1	127.333.500					1	127.333.500	33,3	106,27
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terbitnya Kebijakan Teknis Pencatatan Sipil	Dokumen	0	1	24.234.500	0	0	0		1	24.234.500	100	96,94
		Jumlah Rakor Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun	kali		0						0		nan	
2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Asistensi penyusunan RKA DAK Non Fisik Kabupaten/Kota	kali	0	1	103.099.000	0	0	0		1	103.099.000	100	108,73
		Laporan pelaksanaan realisasi DAK Kabupaten/Kota dan Provinsi	dokumen		1						1		100	
		Laporan penyelenggaraan pencatatan sipil Kabupaten/Kota	dokumen		1						1		100	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Fasilitas terkait Pencatatan Sipil, Sosialisasi terkait	laporan		3	136.453.900					3	136.453.900	100	93,27

		Pencatatan Sipil, KIE kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil												
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya pedoman pelaksanaan administrasi pencatatan sipil yang disepakati Kabupaten/Kota	dokumen	0	1	46.272.000	0	0	0		1	46.272.000	100	98,36
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi	orang	0	50	42.248.700	0	0	0		50	42.248.700	100	85,78
2.12.03.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya informasi terkait stunting	dokumen	0	1	47.933.200	0	0	0		1	47.933.200	100	95,87
		Teredukasinya pemangku kepentingan dan masyarakat terkait stunting	kali		1						1		100	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan, serta Bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil	laporan		2	125.345.906					2	125.345.906	100	89,07
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pencatatan sipil	kabupaten/kota	0	19	40.034.006	0	0	0		19	40.034.006	100	98,3
		Tersedianya laporan evaluasi terkait pencatatan sipil Kabupaten/Kota	dokumen		1						1		100	
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta bimtek bina aparatur capil	orang	0	38	85.311.900	0	0	0		38	85.311.900	100	85,31
		Jumlah peserta bimtek capil	orang		38						38		100	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Sumatera Barat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi adalah :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya

Tugas dan Fungsi masing – masing struktur organisasi dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b) menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah dan pengelolaan urusan ASN
- c) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- d) menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota;
- g) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- h) menyelenggarakan Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
- i) menyelenggarakan Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan ;
- j) menyelenggarakan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- k) menyelenggarakan Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- l) menyelenggarakan Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;

- m) menyelenggarakan Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan;
- n) menyelenggarakan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kelembagaan
- o) menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- p) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- q) menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil di Sumatera Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 4 unit kerja eselon III dan masing-masingnya terdiri dari 2 unit eselon IV di sekretariat dan 3 unit eselon IV bidang. Unit kerja tersebut adalah :

1. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata

laksana di lingkungan Dinas; dan

- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian

Untuk pelaksanaan tugas kesekretariatan dibantu oleh 2 Esselon IV yaitu;

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

2. Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk

- (1) Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitas dan pembinaan umum di bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur dan Pendaftaran Penduduk;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 3 Esselon IV yaitu;

a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk

- (1) Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahana pelaksanaan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen kependudukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk; dan

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk.

b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk

- (1) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi

- (1) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.

3. Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil

- (1) Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi Dan Dokumentasi.

Untuk pelaksanaan tugas Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 3 Esselon IV yaitu;

a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil

- (1) Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan sipil.

b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil

- (1) Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil.

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi

- (1) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.

Untuk pelaksanaan tugas PIAK dibantu oleh 3 Esselon IV yaitu;

- a.** Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - (1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

b. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

- (1) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

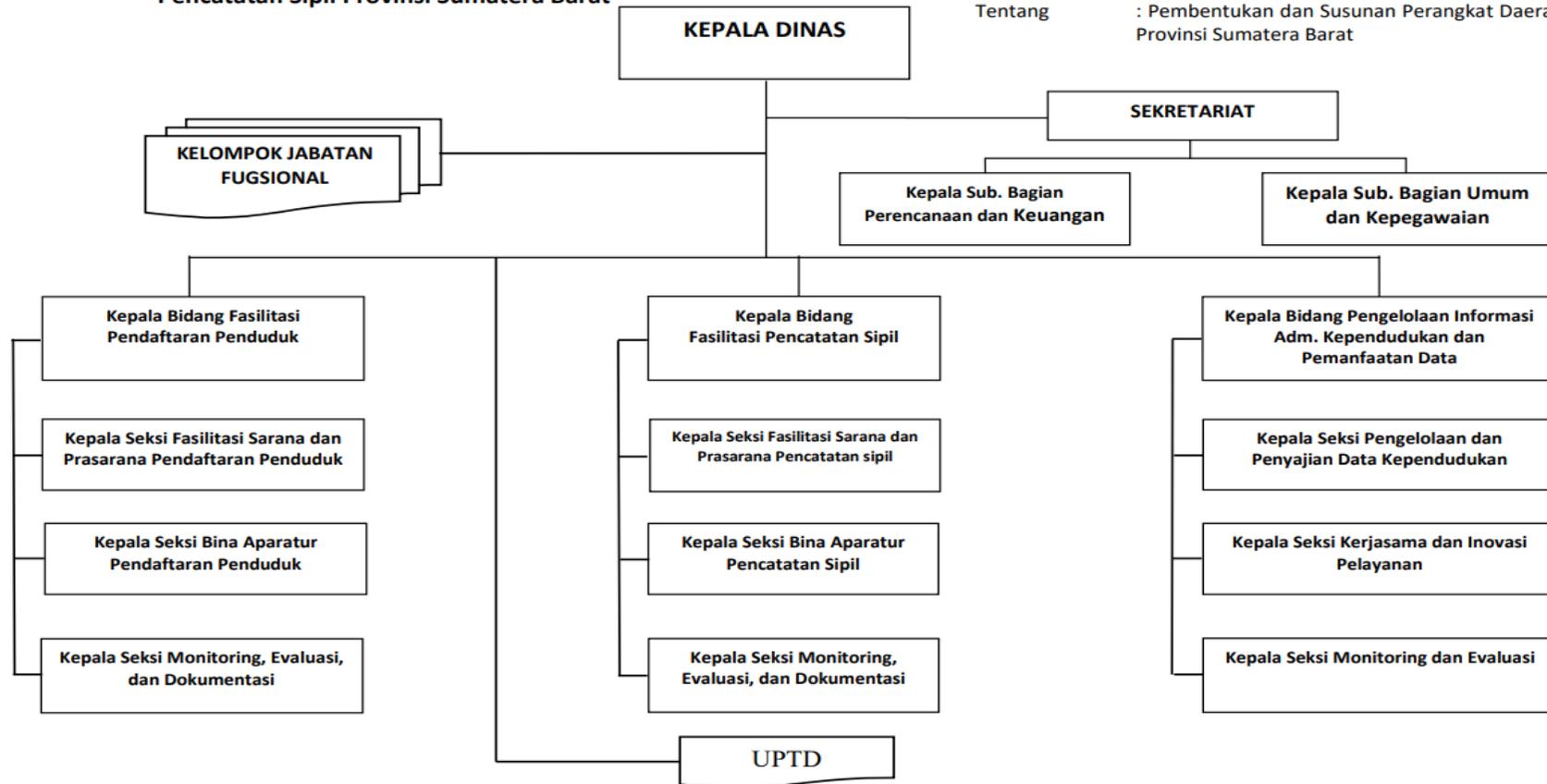
- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi.

Struktur Organisasi

Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 13 Tahun 2019
 Tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas ditetapkan beberapa indikator yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah:

7.1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan rencana Kerja tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian pada tahun 2023 menurut tujuan dan sasaran yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	
1	Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan	100 %
2	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	90,5%
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB
4	Tingkat Kepuasan terhadap layanan umum	100
5	Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian	100
6	Tingkat kepuasan terhadap layanan aset	100

7.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah

NO	Indikator	Target
1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100
2	Pemanfaatan data kependudukan (%)	100
3	Persentase kepemilikan dokumen kepedudukan(%)	90,5

TABEL T-C.30

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah					Realisasi capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun			100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-
2	Pemanfaatan data kependudukan (%)			100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	100	100	-
3	Persentase kepemilikan dokumen kepedudukan(%)			86,62	90,5	92,37	94,25	96,16	-	-	-	-	-	86,62	90,5	-
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD			BB	BB	BB	BB	A	BB	-	-	-	-	-	BB	-

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telah teridentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan singel Identity number dan pemanfaatan data kependudukan.
2. Masih rendahnya inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
3. Belum maksimalnya fasilitasi penyediaan jaringan tertutup dan pembuatan aplikasi untuk OPD dan Lembaga Pengguna lainnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Belum maksimal terlaksananya perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan instansi pengguna tingkat provinsi.
5. Belum tersajinya Profil Kependudukan Kab/Kota tepat waktu sesuai dengan substansi Pedoman Penyusunan

Belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam penyajian data secara elektronik untuk mendukung Dukcapil Go-Digital, Dalam rangka sinergitas dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kependudukan dan pencatatan sipil antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun Kementerian/Lembaga telah dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan konsultasi secara berkala untuk mencapai tujuan pembangunan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat

informasi tentang program, kegiatan, serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses review tersebut sangat penting untuk dilakukan agar terjadi konsistensi dan sinkronisasi terhadap tujuan, sasaran seperti yang telah diuraikan diatas. Namun, untuk perbandingan dengan dokumen rancangan awal RKPD tidak dilakukan karena dokumen rancangan awal RKPD dalam tahap penyusunan.

Pada rancangan Awal RKPD Tahun 2022 pagu indikatif berdasarkan kebutuhan sekitar Rp.15,5 Milyar. Hal ini dikarenakan pagu indikatif pada tahun sebelumnya tidak memenuhi urusan teknis dinas sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu urusan kewenangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil sehingga belum maksimal berjalan sebagaimana seharusnya.

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB, DUKCAPIL

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/KEG/SUB KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	TOTAL PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				16.245.391.306 15.955.391.306	TOTAL PAGU PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				11.561.005.661 8.554.073.586	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.062.140.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				303.187.500	
01	Penyusunan Rencana Strategis dan Renja Perangkat Daerah	Padang	Dokumen Rencana Strategis dan Renja Dinas yang Disusun	2 dokumen	202.428.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Dokumen Rencana Strategis dan Renja Dinas yang disusun	2 dokumen	16.951.100	
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Padang	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	9 dokumen	202.428.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang	Dokumen Anggaran (RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan)	6 Dokumen	47.481.600	

03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Padang	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP,LPPD,LKPj, Laporan Tahunan)	4 dokumen	202.428.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan (Forum Perangkat Daerah/Dukcapil)	1 kali	143.119.000	
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Padang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan (forum perangkat daerah, forum Dukcapil)	2 kali	202.428.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, LPPD, LKPj, Laporan Tahunan) Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan	4 laporan 4 laporan	95.635.800	
05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang	Dokumen Evaluasi Kinerja Triwulan	4 dokumen	252.428.000						
	Administrasi Keuangan				6.512.251.306	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.254.708.611	
06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Gaji dan Tunjangan ASN Dukcapil yang dibayarkan 1 tahun	50 orang	6.007.391.306	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Gaji dan Tunjangan ASN Dukcapil yang dibayarkan 1 tahun	50 orang	4.749.472.661	
07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Padang	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	13 laporan	202.428.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang	Jasa Administrasi keuangan (Pengelola keuangan, Pengelola barang milik daerah/aset, Honor PBJ)	12 Bulan	362.323.850	
08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Padang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	202.428.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Padang	Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	79.680.100	
09	Penyusunan Akuntansidan Pelaporan Keuangan	Padang	Laporan Aset Semesteran	2 dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Padang	Laporan Keuangan Bulanan dan Semester	13 Laporan	63.232.000	

	Administrasi Umum				8.172.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				88.939.925	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padan g	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan	7.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Padan g	Jasa Jaminan Milik Daerah	2 jenis	41.300.000	
								Kendaraan Dinas	6 unit		
								Rumah Jabatan	1 tahun		
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Padan g	Kebutuhan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi, Kebutuhan Pembayaran Listrik, Air, dan Telekomunikasi	12 bulan 12 bulan	311.600.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 12pada SKPD	Padan g	Laporan Aset	2 Dokumen	45.437.925	
12	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Padan g	Tersedianya jasa kesehatan jasmani, jasa kesehatan rohani, rohaniawan, dan dukungan penerapan new normal	12 bulan	30.240.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Padan g	Tertatanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	2.202.000	
13	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padan g	Gedung Kendaraan dinas Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	1 unit 6 unit 12 bulan	300.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100.960.200	
14	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Padan g	Jasa administrasi keuangan (pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah/aset/tim pengadaan, pengelolaan sistem informasi,	12 bulan	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padan g	Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	60 stel	45.000.000	

			petugas PPHPK)							
15	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padan g	Jasa Kebersihan Jasa Pengamanan Jasa Sopir Terpenuhinya jasa kebersihan, sopir, dan pengaman kantor	5 orang 6 orang 5 orang 12 bulan	538.192.368	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padan g	ASN Dinas Dukcapil yang mengikuti Bimtek	21 orang	55.960.200
16	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padan g	Alat tulis yang disediakan	12 bulan	90.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.186.804.250
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padan g	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	90.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padan g	Komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	12 bulan	19.538.000
18	Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Gedung Kantor	Padan g	Komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padan g	Akses Point Wireless Alat Bantu Sosialisasi APAR Bracket dan struktur Dispenser Honor Pokja Karpet Laptop Mesin Penghancur Kertas Mic Conference Monitor touch screen PC All in One Proyektor Scanner Sound system Tangga lipat telescopic Tersedianya komputer dan	3 unit 1 set 1 unit 5 set 5 unit 5 OP 100 meter 1 unit 6 unit 1 set 1 set 1 unit 1 1 unit 1 set 1 set	638.292.050

								jaringan komputerisasi Tong sampah 3 warna Tong Sampah dorong fiberglass UPS Vacuum cleaner Video controler Video Spliter Wall Display (TV LED) 46 inch	2 unit 3 unit 15 unit 1 unit 1 set 1 unit 9 unit		
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Padan g	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padan g	bahan logistik kantor yang disediakan Makanan dan Minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	12 bulan 12 bulan	113.184.000	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padan g	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padan g	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	47.738.250	
21	Pemyediaan Makanan dan Minuman	Padan g	Tersedianya makan dan minum rapat	12 bulan	62.106.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Padan g	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	15.000.000	
22	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Padan g	Terlaksananya rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah	12 bulan	1.772.561.632	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padan g	Rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	353.051.950	
23	Pengadaan Meubeler	Padan g	Kursi eselon 2 Kursi hadap eselon 4 Meja dan Kursi	1 unit 11 unit 1 set	93.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				72.115.850	

			putar Meja eselon 2 Meja makan minum Rak buku kayu Sofa Tersedianya meubeler	1 unit 1 set 2 unit 1 set 7 jenis						
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padan g	Akses point wireless Alat bantu sosialisasi APAR Bracket dan struktur Dispenser Honor pokja Karpas Laptop Mesin penghancur kertas Mic Conference Monitor Touch Screen PC All in One Proyektor Scanner Sound System Tangga lipat telescopic Tersedianya komputer dan Jaringan komputerisasi Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tong sampah 3 warna Tong sampah	3 unit 1 set 1 unit 5 set 5 unit 5 op 100 meter 1 unit 6 unit 1 set 1 set 1 unit 1 set 1 unit 1 set 1 set 7 jenis 16 jenis 2 unit	651.350.000	Pengadaan Mebel	Padan g	Kursi eselon II Kursi Hadap eselon IV Meja dan Kusi Putar Meja eselon II Meja makan minum Rak Buku Kayu Sofa	1 unit 11 unit 1 set 1 unit 1 set 2 unit 1 set	72.115.850

			dorong fiber glass UPS Vacum Cleaner Video Controller Video Spliter Wall Display (TV LED) 46 inc	3 unit 15 unit 1 set 1 set 1 unit 9 unit						
25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Padan g	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	1 unit	30.000.000	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				915.387.250
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Padan g	Jarkomdat Komputer Laptop Peralatan gedung kantor yang terpelihara Printer Server Videotron	1 unit 19 unit 26 unit 12 bulan 19 unit 3 unit 1 unit	106.850.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padan g	Jumlah surat yang didistribusikan	350 surat	3.997.950
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Padan g	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor	3 jenis 8 jenis	100.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Padan g	Air Internet Kebutuhan Jasa Informasi dan Dokumentasi Listrik Rekening tagihan yang dibayarkan Telepon	300 meter kubik 80 Mbps 12 bulan 8500 KWH 12 bulan 1 rekening	337.995.800

28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	6 unit	178.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang	Jasa Kebersihan Jasa kebersihan, sopir dan pengaman kantor Jasa Kesehatan Jasmani Jasa Pengaman Jasa Sopir	5 orang 12 Bulan 12 Bulan 6 orang 4 orang	573.393.500	
29	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Padang	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 unit	3.764.400.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				631.970.000	
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Padang	Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	1 unit	41.190.000	
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				209.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 unit	194.930.000	
31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Padang	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 stel	111.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang	Gedung kantor yang dipelihara Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rumah jabatan yang dipelihara	1 unit 1 unit 1 unit	266.900.000	
32	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang	ASN yang mengikuti bimtek	15 orang	98.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang	Instalasi dan Jaringan yang dipelihara (Listrik, Telp/Internet, Air)	3 jenis	128.950.000	

							Kota Bukittinggi				
						Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Padang	Jumlah peserta sosialisasi	40 orang	9.569.000	
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				75.960.000	
						Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				29.000.000	
						Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Padang	Sosialisasi dan Pelaksanaan peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXVIII Tingkat Provinsi	1 kali	29.000.000	
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan				46.960.000	

					Kesertaan Ber-KB					
					Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Padang	Jumlah koordinasi, pembinaan dan penilaian pelaksana terbaik Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan ke Kab/Kota	19 Kabupaten/Kota	46.960.000	
							Jumlah pelaksana terbaik kategori Kesrak PKK Bangga Kencana	10 Kab/Kota		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				108.950.000	
					Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				57.880.000	
					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Padang	Jumlah ASN Pemprov Sumbar terpilih sebagai ASN Model Program KKBPK (Duta ASIK)	9 orang	41.181.000	
					Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Padang	Jumlah Pengelola dan Pelaksana PIK-R yang mengikuti workshop	38 orang	16.699.000	

						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				51.070.000	
						Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Baliat (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Padang	Jumlah FGD pengelolaan program ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, BKL, dan UPPKS Jumlah orientasi Lapangan pengelolaan program ketahanan keluarga	1 kali 4 ormas/orsos	30.000.000	
						Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Sumba	Jumlah fasilitasi pengembangan prgram di Kampung KB	19 Kabupaten/Kota	21.070.000	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				51.000.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.104.374.575	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				51.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				162.935.100	
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Sumba	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Padang			66.136.000	

			penduduk							
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Sumba r	Tersajinya data penduduk non permanen dan penduduk rentan	19 Kabupaten/Kota	17.000.000	- Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk (Buku Putih)		Jumlah Rakor Pencapaian TargetPerekaman dan Kepemilikan KTP-el yang dilaksanakan	2 kali	41.136.000
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Sumba r	Terbitnya kebijakan teknis pendaftaran penduduk	19 Kabupaten/Kota	17.000.000	- Rapat Koordinasi Pencapaian Target Perekaman dan Kepemilikan KTP-el (DAK)		Terbitnya Kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	25.000.000
						Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Sumba r	Tersedianya data penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	19 Kabupaten/Kota	31.846.000
						Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Sumba r	Tertatanya standar operasional pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai dengan peraturan yang berlaku	19 Kabupaten/Kota	31.074.100
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Sumba r	Terpantau dan Terkendalinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	19 Kabupaten/Kota	33.879.000
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				516.245.500
						Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Sumba r			466.995.100

						- Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terfasilitasinya pendistribusian pendistribusian blanko KTP-el kab/kota	19 Kabupaten/Kota	179.240.900
						- Pendistribusian Blanko KTP-el (DAK)		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan adminduk	12 bulan	60.000.000
						- Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		Terlaksananya pekan pelayanan pendaftaran penduduk	4 kali	227.754.200
						Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Padang			49.250.400
						- Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan		Jumlah sosialisasi kebijakan adminduk yang dilaksanakan	1 kali	20.860.000
						- Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk (DAK)		Jumlah workshop Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	1 kali	28.390.400
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan				425.193.975
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Sumbang			200.193.975
						- Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran penduduk	19 Kabupaten/Kota	29.064.435

						- Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Laporan Hasil Monev Kebijakan dan Penyelenggaraan Adminduk	1 dokumen	121.129.540	
						- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ke Kabupaten/Kota (DAK)		Terpilihnya Dinas Kabupaten/Kota Terbaik	5 kabupaten/kota	50.000.000	
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Padang, Kab. Solok			225.000.000	
						- Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Front Office) (DAK)		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek front office	57 orang	75.000.000	
						- Bimbingan Teknis Pengarsipan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK)		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek pengarsipan	38 orang	50.000.000	
						- Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek daftduk	38 orang	50.000.000	
						- Bimbingan Teknis Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk (DAK)		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek bina aparatur	50 orang	50.000.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				17.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				576.994.600	
	Pelayanan Pencatatan Sipil				17.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil				240.244.200	

	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Sumba r	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemanfaatan data peristiwa penting	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Padan g	Jumlah Rakor Pencapaian Target Perekaman dan Kepemilikan KTP-el yang dilaksanakan Terbitnya Kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk	2 kali 1 dokumen	25.000.000	
						Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting	Sumba r	Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Penting	19 Kabupaten/ Kota	53.562.000	
						Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Sumba r			161.682.200	
						- <i>Pembahasan Penggunaan DAK (DAK)</i>		<i>Asistensi penyusunan RKA DAK non fisik Kab/Kota</i>	<i>1 kali</i>	<i>60.000.000</i>	
						- <i>Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>		<i>Laporan Penyelenggaraan pencatatan sipil kab/kota</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>41.682.200</i>	
						- <i>Monitoring dan Evaluasi DAK (DAK)</i>		<i>Laporan pelaksanaan realisasi DAK kab/kota dan Provinsi</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>60.000.000</i>	
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi				149.250.400	

						Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Padan g	Tersedianya pedoman pelaksanaan administrasi pencatatan sipi; yang disepakati kab/kota	1 dokumen	50.000.000	
						Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Padan g			49.250.400	
						- <i>Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>		<i>Jumlah peserta workshop</i>	25 orang	20.860.000	
						- <i>Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (DAK)</i>		<i>Jumlah peserta sosialisasi</i>	50 orang	28.390.400	
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Sumba r	Teredukasinya pemangku kepentingan dan masyarakat terkait stunting	1 kali	50.000.000	
								Tersedianya informasi terkait stunting	1 dokumen		
						Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				187.500.000	
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Sumba r			87.500.000	
						- <i>Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ke Kabupaten/Kota (DAK)</i>		<i>Tersedianya laporan evaluasi terkait pencatatan sipil kab/kota</i>	1 dokumen	50.000.000	

						- Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil		Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan administrasi pencatatan sipil	19 Kabupaten/Kota	37.500.000	
						Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Bukitti nggi			100.000.000	
						- Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil (DAK)		Jumlah peserta bimtek capil	38 orang	50.000.000	
						- Bimbingan Teknis Bina Aparatur Pencatatan Sipil		Jumlah peserta bimtek bina aparatur capil	50 orang	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				188.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				785.434.900	
	Penataan Administrasi Kependudukan				34.000.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				56.000.000	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi	Padang	Jumlah dokumen SOP terkait pemantauan, evaluasi dan pengendalian PIAK dan Pemanfaatan Data	4 dokumen	17.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Peyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padang	Jumlah dokumen SOP terkait pemantauan, evaluasi dan pengendalian PIAK dan Pemanfaatan Data	4 dokumen	28.000.000	

	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Padang	Jumlah dokumen pedoman pengolahan dan penyajian data kependudukan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 dokumen	17.000.000	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat, dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Padang	Jumlah dokumen pengolahan dan penyajian data kependudukan tingkat Provinsi dan Kab/Kota	1 dokumen	28.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi				69.000.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				437.634.900	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Padang	Laporan hasil pemantauan dan pengendalian kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	1 dokumen	17.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sumba			175.000.000	
	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Padang	Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi	1 kali	17.000.000	- <i>Pengelolaan SIAK</i>		Jumlah sarana dan prasarana ruang server Terfasilitasinya validasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terkelolanya Jarkomdat Tersedianya jasa Administrator Jaringan dan Programmer	3 unit 2 kali 12 bulan 1 orang	150.000.000	

	Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Sumba r	Terlaksananya rakor penyelenggaraan adminduk	4 kali	18.000.000	- <i>Rapat Koordinasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan (DAK)</i>		<i>Terlaksananya Rakor Pengolahan dan Penyajian Data</i>	<i>1 kali</i>	<i>25.000.000</i>	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Sumba r	Jumlah sarana dan prasarana ruang server Terfasilitasinya validasi data SIAK Terkelolanya jarkomdat di Kab/Kota Terlaksananya pekan pelayanan pendaftaran penduduk dan sumbar expo Tersedianya jasa administrasi jaringan dan programmer	3 unit 2 kali 12 bulan 1 kali 1 orang	17.000.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Padan g			57.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				85.000.000	- <i>Sosialisasi terkait Pemanfaatan Data</i>		<i>Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan tingkat provinsi</i>	<i>1 kali</i>	<i>39.000.000</i>	
	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi	Sumba r	Tersupervisinya inonvasi pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai aturan	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	- <i>PublikasiMedia Cetak dan Elektronik (DAK)</i>		<i>Publikasi informasi terkait adminduk</i>	<i>6 kali</i>	<i>18.000.000</i>	

	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan	Sumba r	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam pelaksanaan administrasi pencatatan sipil	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Sumba r			91.634.900	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Sumba r	Laporan hasil pemantauan database Terpilihnya dinas Kabupaten/Kota terbaik	1 laporan 5 Kabupaten/ Kota	17.000.000	- Rapat koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Forum Dukcapil)		Jumlah Rakor Penyelenggaraan Adminduk	4 kali	91.634.900	
	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Sumba r	Terpantau dan terkendalinya penyelenggaraan adminiduk	19 Kabupaten/ Kota	17.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Sumba r			114.000.000	
	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Padan g	Terlaksananya bimtek pencatatan sipil Terlaksananya bimtek pendaftaran penduduk Terlaksananya bimtek PIAK dan pemanfaatan data	1 kali 1 kali 1 kali	17.000.000	- Pemantauan dan Pengendalian Kerjasama Pemanfaatan Data		Laporan hasil pemantauan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan data	1 dokumen	53.000.000	
						- Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK)		Jumlah OPD yang telah melakukan Pemanfaatan Data	12 OPD	61.000.000	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				291.800.000	

						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sumba r			191.800.000	
						- <i>Supervisi Inovasi Pengolahan dan Penyajian Data</i>		<i>Tersupervisinya inovasi pengolahan dan penyajian data kependudukan sesuai aturan</i>	<i>19 Kabupaten/Kota</i>	<i>29.590.000</i>	
						- <i>Pemantauan Pemeliharaan Database Kependudukan</i>		<i>Laporan hasil pemantauan pemeliharaan database kependudukan</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>52.210.000</i>	
						- <i>Pemantauan Aplikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)</i>		<i>Laporan hasil pemantauan aplikasi pelayanan adminduk</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>85.000.000</i>	
						- <i>Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Go Digital (DAK)</i>		<i>Jumlah peserta rakor</i>	<i>25 orang</i>	<i>25.000.000</i>	
						Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bukitti nggi, Padan g			100.000.000	
						- <i>Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)</i>		<i>Terlaksananya Bimtek PIAK</i>	<i>19 Kabupaten/Kota</i>	<i>50.000.000</i>	

						- Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAK)		Terlaksananya Bimtek Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	19 Kabupaten/Kota	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				34.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				265.178.000	
	Penyediaan Pprofil Kependudukan				34.000.000	Penyediaan Profil Kependudukan				265.178.000	
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Padang	Jumlah buku data kependudukan persemester Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota	2 buku data (200 buku) 2 kali	17.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Padang	Jumlah buku data kependudukan persemeste Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota	2 buku data (200 buku) 2 kali	90.000.000	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Sumbar	Jumlah profil kependudukan tingkat provinsi yang disusun Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota dan OPD/Instansi teknis yang dilaksanakan Terlaksananya rapat teknis evaluasi hasil Tersupervisinya profil kependudukan Kab/Kota	1 profil (100 buku) 3 kali 1 kali 19 Kabupaten/Kota	17.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Sumbar			175.178.000	

						- Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	60 orang	61.000.000	
						- Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan	Tersupervisinya profil kependudukan Kab/Kota	19 Kabupaten/Kota	30.178.000	
						- Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah rapat pembahasan dengan Kab/Kota dan OPD/instansi teknis yang dilaksanakan Jumlah profil kependudukan tingkat provinsi yang disusun	3 kali 1 profil (100 buku)	84.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud yang sesuai dalam RPJMD adalah Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Selanjutnya penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mempedomani Program, Kegiatan Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada program/kegiatan/sub kegiatan yang harus diusulkan masyarakat.

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KB, DUKCAPIL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---

BAB III

Tujuan dan Sasaran OPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan terhadap RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri tahun 2020 - 2024

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

“Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN7)“

Ini merupakan agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 (PN7), dalam rangka pencapaian Prioritas nasional 7 (tujuh), kementerian dalam negeri menetapkan 3 (tiga) tujuan, yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah terdapat pada tujuan ke-2 (dua)

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”

Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

“Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)”

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)

Dengan arah kebijakan fokus pada :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
2. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
3. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
4. Pemanfaatan *Database* Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

3.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Daerah

A. Arah kebijakan RPJP Provinsi Tahun 2005-2025

Pada tahap sekarang memasuki tahapan RPJM ke 4 (2021-2025) secara umum adalah menjadi provinsi terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis pada tahun 2025, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik;
3. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah, dan berdaya saing tinggi;
4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

B. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, salah satu lembaga Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan misi di

atas antara lain meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kab/Kota se Sumatera Barat melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, Meningkatnya kualitas penyajian dan pemanfaatan data kependudukan Prov/Kab/Kota melalui koordinasi.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang berkaitan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Dengan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah pada Misi :

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. Dengan tujuan Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani.

Sebagai implementasi dari Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera barat tahun 2021-2026, dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi sumatera barat mempunyai tujuan, sasaran yang dituangkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-20226 sebagai berikut :

1. Tujuan

1.1 Mewujudkan database kependudukan sebagai salah satu basis data pembangunan daerah

1.1.1 Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan

1.2 Meningkatkan Organisasi yang Akuntabel dan melayani

1.2.1 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan

2. Sasaran

2.1 Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi

2.1.1 Persentase perangkat daerah lingkup provinsi yang memanfaatkan data kependudukan

2.2 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap

2.2.1 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan

2.3 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja organisasi

2.3.1 Akuntabilitas Kinerja OPD

2.4 Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi

2.4.1 Tingkat Kepuasan terhadap layanan umum

2.4.2 Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian

2.4.3 Tingkat kepuasan terhadap layanan aset

3. Program

3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

3.2 Program Pendaftaran Penduduk

3.3 Program Pencatatan Sipil

3.4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang telah dirumuskan di atas. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan hal di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.12.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.12.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

2.12.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

2.12.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.12.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.12.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

2.12.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2.12.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.12.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.12.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.12.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.12.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.12.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.12.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.12.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.12.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.12.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.12.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.12.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.12.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.12.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.12.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.12.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.12.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
2.12.02.1.01.02 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2.12.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
2.12.02.1.01.04 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
2.12.02.1.02.01 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12.02.1.02.02 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.02.1.02.03 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.02.1.02.04 Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.02.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

2.12.02.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.02.1.03.02 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL

2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil

2.12.03.1.01.02 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi

2.12.03.1.01.03 Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting

2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

2.12.03.1.02.01 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

2.12.03.1.02.02 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

2.12.03.1.02.03 Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil

2.12.03.1.02.04 Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil

2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

2.12.03.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

2.12.03.1.03.02 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2.12.04.1.01 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.1.01.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.1.01.02 Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

2.12.04.1.02.01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.1.02.02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.1.02.03 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

2.12.04.1.02.04 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi

2.12.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

2.12.04.1.02.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

2.12.04.1.02.07 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.1.03.02 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan

2.12.05.1.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

2.12.05.1.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah. Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Administrasi Kependudukan Tahun 2022 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.469.175.000	8 kegiatan/27 Sub Kegiatan
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	498.214.000	3 kegiatan/9 Sub Kegiatan
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	498.214.000	3 kegiatan/8 Sub Kegiatan
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	517.500.000	3 kegiatan/11 Sub Kegiatan
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	203.571.000	1 kegiatan/2 Sub Kegiatan
JUMLAH		11.186.674.000	10 kegiatan/48 Sub Kegiatan

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE					PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
									TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.186.674.000				11.461.617.000
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					11.186.674.000				11.461.617.000
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE KETERCAPAIAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persen		100	9.469.175.000			100	9.701.905.000
2	12	1	01.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		100	635.000.000			100	635.000.000
2	12	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Renstra, Renja)	Dokumen	SUMATERA BARAT	2	215.000.000	APBD		2	215.000.000

2	12	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Dokumen	SUMATERA BARAT	1	30.000.000	APBD	1	30.000.000
2	12	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Dokumen	SUMATERA BARAT	2	30.000.000	APBD	2	30.000.000
2	12	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	Dokumen	SUMATERA BARAT	1	30.000.000	APBD	1	30.000.000
2	12	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Dokumen	SUMATERA BARAT	2	30.000.000	APBD	2	30.000.000
2	12	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun (LAKIP, LPPD, LKPj)	Dokumen	SUMATERA BARAT	4	150.000.000	APBD	4	150.000.000
2	12	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun (Laporan Evaluasi Kinerja (TW, Simbangda, SPIP, SPAN Lapor, IKM, Reformasi Birokrasi)	Dokumen	SUMATERA BARAT	6	150.000.000	APBD	6	150.000.000
2	12	1	01.02	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		100	4.698.056.000		100	5.724.337.062
2	12	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Orang	SUMATERA BARAT	55	4.138.056.000	APBD	57	5.164.337.062
2	12	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	SUMATERA BARAT	11	385.000.000	APBD	11	385.000.000
2	12	1	01.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	SUMATERA BARAT	33	15.000.000	APBD	33	15.000.000
2	12	1	01.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	SUMATERA BARAT	1	80.000.000	APBD	1	80.000.000
2	12	1	01.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	SUMATERA BARAT	1	10.000.000	APBD	1	10.000.000

2	12	1	01.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	SUMATERA BARAT	13	70.000.000	APBD	13	70.000.000
2	12	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		100	130.105.000		100	140.000.000
2	12	1	01.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Dokumen	SUMATERA BARAT	4	10.000.000	APBD	4	10.000.000
2	12	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan (Kendaraan dan PBB Rumah Dinas)	Unit	SUMATERA BARAT	7	45.000.000	APBD	7	45.000.000
2	12	1	01.03	4	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	[1] Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban; [2] Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	Dokumen	SUMATERA BARAT	[1] 2 lap ;[2] 2 orang	18.160.000	APBD	[1] 2 lap ;[2] 2 orang	25.000.000
2	12	1	01.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Dokumen	SUMATERA BARAT	2	48.945.000	APBD	2	50.000.000
2	12	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	Dokumen	SUMATERA BARAT	1	8.000.000	APBD	1	10.000.000
2	12	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		100	362.500.000		100	417.500.000
2	12	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	SUMATERA BARAT	110	82.500.000	APBD	110	82.500.000

2	12	1	01.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	[1] Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola ; [2] Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (Anjab ABK, Peta Jabatan, Informasi Jabatan, Evaluasi Jabatan, Rencana Kebutuhan Pegawai dll)	dokumen	SUMATERA BARAT	6	30.000.000	APBD	6	35.000.000
2	12	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	[1] Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (SPIP); [2] Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	orang	SUMATERA BARAT	55	150.000.000	APBD	55	150.000.000
2	12	1	01.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	SUMATERA BARAT	1	50.000.000	APBD	1	65.000.000
2	12	1	01.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	[1] Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi; [2] Jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali	SUMATERA BARAT	10	50.000.000	APBD	15	85.000.000
2	12	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		100	627.781.452		100	655.247.938
2	12	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	SUMATERA BARAT	12	15.000.000	APBD	12	30.000.000
2	12	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	SUMATERA BARAT	15	100.000.000	APBD	15	100.000.000
2	12	1	01.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit	SUMATERA BARAT	5	25.000.000	APBD	0	-
2	12	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	buah	SUMATERA BARAT	200	87.688.500	APBD	200	90.247.938

2	12	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	SUMATERA BARAT	12	31.183.000	APBD	12	35.000.000
2	12	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	SUMATERA BARAT	12	15.000.000	APBD	12	25.000.000
2	12	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Orang	SUMATERA BARAT	285	13.000.000	APBD	285	15.000.000
2	12	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Dokumen	SUMATERA BARAT	12	250.909.952	APBD	12	270.000.000
2	12	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	arsip	SUMATERA BARAT	12	30.000.000	APBD	12	30.000.000
2	12	1	01.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	Orang	SUMATERA BARAT	1	60.000.000	APBD	1	60.000.000
2	12	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		100	1.335.000.000		100	375.000.000
2	12	1	01.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Unit	SUMATERA BARAT	1	250.000.000	APBD	1	250.000.000
2	12	1	01.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	unit	SUMATERA BARAT	20	120.000.000	APBD	6	50.000.000
2	12	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Jenis	SUMATERA BARAT	20	255.000.000	APBD	3	75.000.000
2	12	1	01.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit	SUMATERA BARAT	1	710.000.000	APBD	0	0
2	12	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	1.043.612.548		100	1.076.500.000

2	12	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	SUMATERA BARAT	500	6.500.000	APBD		500	6.500.000
2	12	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Tagihan dibayarkan [1] Air ; [2] Listrik ;[3] Telp;[4] Internet	[1] M ³ ; [2] KWH; [3] rekening	SUMATERA BARAT	[1] 300 ; [2] 8500 ; [3] 1	318.840.000	APBD		[1] 300 ; [2] 8500 ; [3] 1	350.000.000
2	12	1	01.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia : [1]Jasa Kebersihan, [2]Jasa Sopir, [3]Jasa Pengaman	Orang	SUMATERA BARAT	[1] 5; [2]4; [3] 6;	718.272.548	APBD		[1] 5; [2]4; [3] 6;	720.000.000
2	12	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	Persen		100	637.120.000			100	678.320.000
2	12	1	01.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	unit	SUMATERA BARAT	1	41.190.000	APBD		1	41.190.000
2	12	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	SUMATERA BARAT	8	229.000.000	APBD		9	263.130.000
2	12	1	01.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Unit	SUMATERA BARAT	12	10.500.000	APBD		12	12.000.000
2	12	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	SUMATERA BARAT	12	10.500.000	APBD		12	12.000.000
2	12	1	01.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Unit	SUMATERA BARAT	1	230.000.000	APBD		1	230.000.000
2	12	1	01.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	jenis	SUMATERA BARAT	15	115.930.000	APBD		15	120.000.000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	persen		98	498.214.000			98,25	510.459.000
						Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	persen		50				60	

(KIA)													
2	12	2	01.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	Persen		100	115.214.000		100	120.214.000
2	12	2	01.01	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Kebijakan Teknis Yang Ditetapkan	dokumen	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	1	25.000.000
2	12	2	01.01	2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen data penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	dokumen	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	1	25.000.000
2	12	2	01.01	3	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah dokumen regulasi terkait tata kelola yang ditetapkan	dokumen	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	2	25.000.000
2	12	2	01.01	4	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah perjanjian Kerjasama Terkait Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	PKS	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	1	25.000.000
2	12	2	01.01	5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	dokumen	SUMATERA BARAT	0	15.214.000	APBD	0	20.214.000

2	12	2	01.0 2		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat	persen		100	183.000.000			100	190.245.000
2	12	2	01.02	1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	kali	SUMATERA BARAT	1	50.000.000	APBD		4	55.245.000
2	12	2	01.02	2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Aparatur mengikuti sosialisasi peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	orang	SUMATERA BARAT	44	50.000.000	APBD		1	50.000.000
2	12	2	01.02	3	Komunikasi. Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	orang	SUMATERA BARAT	38	25.000.000	APBD		1	25.000.000
2	12	2	01.02	4	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Rapat koordinasi terkait Pendaftaran penduduk	kali	SUMATERA BARAT	2	50.000.000	APBD		2	50.000.000
2	12	2	01.02	5	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan konsultasi terkait pendaftaran penduduk	jenis stakeholder	SUMATERA BARAT	2	8.000.000	APBD		2	10.000.000
2	12	2	01.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat	persen		100	200.000.000			100	200.000.000

2	12	2	01.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait pendaftaran penduduk	kab/kota	SUMATERA BARAT	19	100.000.000	APBD	19	100.000.000
2	12	2	01.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah aparatur mengikuti Bimtek terkait pendaftaran penduduk	Orang	SUMATERA BARAT	105	100.000.000	APBD	76	100.000.000
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 thn	persen		95,00%	498.214.000		96,00%	510.459.000
						Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	persen		100			100	
						Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang melaporkan	persen		100			100	
						Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	persen		100			100	
2	12	3	01.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat	persen	SUMATERA BARAT	100	138.272.000		100	125.000.000
2	12	3	01.01	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis Yang Ditetapkan	dokumen	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	1	25.000.000
2	12	3	01.01	2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah regulasi terkait tata kelola pencatatan sipil	dokumen	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	2	25.000.000

2	12	3	01.01	3	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan peristiwa penting	PKS	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	[1] - [2] 19	25.000.000
2	12	3	01.01	4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan Kab/ Kota yang difasilitasi	unit	SUMATERA BARAT	1	38.272.000	APBD	1	25.000.000
2	12	3	01.01	5	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang disusun	dokumen	SUMATERA BARAT	2	25.000.000	APBD	0	25.000.000
2	12	3	01.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota Se Sumatera Barat	persen	SUMATERA BARAT	100	159.942.000		100	185.459.000
2	12	3	01.02	1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil	kali	SUMATERA BARAT	3	51.942.000	APBD	3	70.459.000
2	12	3	01.02	2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	orang	SUMATERA BARAT	38	50.000.000	APBD	2	50.000.000
2	12	3	01.02	3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait Pencatatan Sipil	orang	SUMATERA BARAT	76	25.000.000	APBD	1	25.000.000
2	12	3	01.02	4	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Rapat koordinasi terkait Pencatatan Sipil	kali	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	2	25.000.000

2	12	3	01.02	5	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan konsultasi terkait Pencatatan Sipil	jenis stakeholder	SUMATERA BARAT	2	8.000.000	APBD	2	15.000.000
2	12	3	01.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan pencatatan sipil Di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat		SUMATERA BARAT	100	200.000.000		100	200.000.000
2	12	3	01.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pencatatan Sipil	kab/kota	SUMATERA BARAT	19	100.000.000	APBD	19	100.000.000
2	12	3	01.03	2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah aparatur mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil	Orang	SUMATERA BARAT	120	100.000.000	APBD	38	100.000.000
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah	persen		1,3	517.500.000		1,2	530.219.000
						Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data	inovasi		9			12	
2	12	4	01.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	SUMATERA BARAT	100	50.000.000		100	50.000.000

2	12	4	01.01	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan. Pelaksanaan. Pemantauan. Evaluasi. Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian Dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	dokumen	SUMATERA BARAT	4	25.000.000	APBD	4	25.000.000
2	12	4	01.01	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan. Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan. Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun	dokumen	SUMATERA BARAT	1	25.000.000	APBD	1	25.000.000
2	12	4	01.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	persen	SUMATERA BARAT	100	267.500.000		100	280.219.000
2	12	4	01.02	1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	kali	SUMATERA BARAT	4	56.515.000	APBD	2	69.234.000
2	12	4	01.02	2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	orang	SUMATERA BARAT	38	25.000.000	APBD	3	25.000.000
2	12	4	01.02	3	Komunikasi. Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk	kali	SUMATERA BARAT	2	25.000.000	APBD	8	25.000.000

2	12	4	01.02	4	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Rapat koordinasi	kali	SUMATERA BARAT	3	50.000.000	APBD	3	50.000.000
2	12	4	01.02	5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah fasilitas penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	kali	SUMATERA BARAT	4	75.000.000	APBD	19	75.000.000
2	12	4	01.02	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah perjanjian kerjasama (PKS) yang disepakati	PKS	SUMATERA BARAT	6	25.000.000	APBD	6	25.000.000
2	12	4	01.02	7	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah stakeholder yang mendapatkan layanan konsultasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jenis stakeholder	SUMATERA BARAT	2	10.985.000	APBD	2	10.985.000
2	12	4	01.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	persentase Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persen	SUMATERA BARAT	100	200.000.000		100	200.000.000
2	12	4	01.03	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dinas Dukcapil Kab/ Kota yang dibina terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab/ Kota	SUMATERA BARAT	19	100.000.000	APBD	19	100.000.000
2	12	4	01.03	2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek terkait PIAK dan Pendayagunaan data kependudukan	Orang	SUMATERA BARAT	120	100.000.000	APBD	120	100.000.000
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	buku		3	203.571.000		3	208.575.000

2	12	5	01.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan	persen	SUMATERA BARAT	100	203.571.000			100	208.575.000
2	12	5	01.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah buku data agregat kependudukan per semester	buku	SUMATERA BARAT	2	90.000.000	APBD		2	90.000.000
2	12	5	01.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku profil kependudukan yang disusun	buku	SUMATERA BARAT	1	113.571.000	APBD		1	118.575.000

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah Program Tahunan Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja.. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya:

1. Dukungan anggaran yang dilimpahkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, masih terbatas;
2. Tidak dianggarkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Adminduk oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan dari pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik.
4. Belum adanya kesadaran OPD lingkup provinsi untuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan penyusunan program/ kegiatan/ sub kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kewenangan sebagai OPD Provinsi yang telah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

Padang, Maret 2022
KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919 198602 1 006